KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : DPR Minta Anggaran Rp 7,7 Triliun
**Tanggal** : Rabu, 11 April 2018
**Surat Kabar** : Koran Tempo
**Halaman** : 7

# DPR MINTA ANGGARAN RP 7,7 TRILIUN

Alokasi terbesar untuk proyek gedung dan alun-alun DPR.

**Hussein Abri Dongoran**
*hussein.abri@tempo.co.id*

**JAKARTA** — Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan bujet Rp 7,7 triliun untuk tahun anggaran 2019. Nilai itu naik 35 persen dari anggaran tahun ini, yang besarnya Rp 5,7 triliun. "Sudah disetujui di tingkat paripurna dan akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah," ujar Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Anton Sihombing, kemarin.

Politikus Golkar ini melanjutkan, porsi kenaikan anggaran terbesar itu akan dipakai untuk melanjutkan pembangunan megaproyek DPR. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, DPR mendapatkan kucuran dana Rp 320 miliar untuk pembangunan gedung dan Rp 281 miliar untuk alun-alun demokrasi.

Selain itu, Anton melanjutkan, bujet tersebut bakal digunakan untuk menambah 15 anggota DPR pada 2019. Tahun depan, anggota DPR akan menjadi 575, dari yang saat ini 560, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sayangnya, Anton enggan merinci jumlah dana yang bakal digelontorkan. "Nanti akan diumumkan," ujarnya.

Kenaikan anggaran Rp 7,7 triliun DPR akan dialokasikan untuk alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. Dari anggaran itu, Rp 4,8 triliun untuk satuan kerja Dewan dan sisanya, Rp 2,8 triliun, untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.

Alokasi anggaran satuan kerja Dewan dibagi menjadi dua, yaitu Program Pelaksanaan Fungsi DPR sebesar Rp 926,7 miliar dan Program Penguatan Kelembagaan Rp 3,9 triliun. Anggaran satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR juga dibagi menjadi dua alokasi dana, yakni Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lain di Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp 2,7 triliun dan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Rp 68 miliar.

Meski kenaikan ini sangat besar, sepuluh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna tidak ada yang menolaknya. Setelah Anton selesai membacakan rencana kenaikan ini, pemimpin rapat paripurna yang juga Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, langsung mengetuk palu tanda persetujuan adanya kenaikan.

Seusai rapat, Fadli menuturkan tidak perlu ada yang mempermasalahkan kenaikan anggaran DPR ini. "Ini masih batas rasional," ujar Wakil Ketua Partai Gerindra itu. Senada dengan Anton, Fadli menuturkan bahwa anggaran itu di antaranya untuk menambah fasilitas, seperti rumah dinas, tenaga ahli, hingga ruangan bagi 15 anggota DPR periode 2019-2024.

Adapun pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti, menuturkan bahwa anggaran itu untuk kegiatan, tunjangan, dan penunjang bagi kerja DPR. "Kalau mengajukan ini seperti sayembara. Kalau mengajukan lima, bisa dapatnya dua, sesuai dengan kesesuaian. Kementerian Keuangan biasanya tak mungkin mengabulkan semua," ujarnya.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mencurigai rencana kenaikan anggaran ini hanya bertujuan untuk menambah pundi-pundi uang bagi anggota DPR yang masih menjabat. Apalagi masa jabatan anggota DPR hanya tinggal satu tahun dan pada tahun ini pun tak bakal efektif karena hanya mementingkan pemilihan umum dan pemilihan presiden 2019. "Ini hanya menambah tunjangan bagi anggota DPR demi kebutuhan individu maupun partai," ujarnya.

Lucius juga heran lantaran kritik masyarakat yang kerap dilontarkan ihwal kenaikan anggaran DPR setiap tahun seperti tidak pernah didengarkan oleh para anggota Dewan. "Ini selalu berulang," ujarnya.

● ARKHELAUS WISNU

# Anggaran Besar Dewan

**ANGGARAN** untuk Dewan Perwakilan Rakyat selalu naik. Namun kenaikan itu tak sebanding dengan kinerja dalam menghasilkan legislasi.

**2011**
Anggaran DPR: **Rp 1,74 triliun**

Untuk legislasi: **Rp 301,7 miliar**
Kinerja: **Dari 91 RUU prioritas, hanya 18 yang disahkan.**

**2012**
Anggaran DPR: **Rp 2 triliun**

Untuk legislasi: **Rp 501,2 miliar**
Kinerja: **Dari 69 RUU prioritas, hanya 10 yang disahkan.**

**2013**
Anggaran DPR: **Rp 2,88 triliun**

Untuk legislasi: **Rp 473,9 miliar**
Kinerja: **Dari 75 RUU prioritas, hanya 7 yang disahkan.**

**2014**
Anggaran DPR: **Rp 2,31 triliun**

Untuk legislasi: **Rp 339,1 miliar**
Kinerja: **Dari 68 RUU prioritas, hanya 3 yang disahkan.**

**2015**
Anggaran DPR: **Rp 5,19 triliun**

Untuk legislasi: **Rp 430,5 miliar**
Kinerja: **Dari 37 RUU prioritas, hanya 3 yang disahkan.**

**2016**
Anggaran DPR: **Rp 4,7 triliun**

Untuk legislasi: **Rp 309,4 miliar**
Kinerja: **Dari 50 RUU prioritas, hanya 10 yang disahkan.**

**2017**
Anggaran DPR: **Rp 4,26 triliun**

Untuk legislasi: **Rp 116,8 miliar**
Kinerja: **Dari 50 RUU prioritas, hanya 6 yang disahkan.**

**2018**
Anggaran DPR: **5,7 triliun**

**2019**
Rencana anggaran: **Rp 7,7 triliun**

TEKS: HUSSEIN ABRI DONGORAN

PERPUSTAKAAN DPR - RI